



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2023 – 2024 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat | : Ke – 7 (tujuh) |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Dengan | : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Selasa, 19 Maret 2024 |
| Waktu | : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I |
| Acara | : 1. Evaluasi Pelaksanaan Program TA. 2023 2. Program Prioritas TA. 2024 3. Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP 4. Evaluasi Tarif Listrik Untuk Industri dan Bisnis di Batam 5. Lain-lain |
| Ketua Rapat | : H. Eddy Soeparno, S.H., M.H (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN) |
| Sekretaris Rapat | : Dwiyanti, S.Sos. |
| Hadir | : A. Pemerintah - Menteri ESDM RI B. 24 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari: 24 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 28 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa 19 Maret 2024 dibuka pukul 15.00 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, S.H., M.H, selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Program TA. 2023
 - b. Program Prioritas TA. 2024
 - c. Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP
 - d. Evaluasi Tarif Listrik Untuk Industri dan Bisnis di Batam
 - e. Lain-lain.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk terus meningkatkan kinerja dan melakukan pengawasan terhadap program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti PJUTS, Konverter Kit, AML, jargas, dan program-program lainnya.
2. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk mengupayakan mengembalikan kewenangan Kementerian ESDM RI terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengingat Kementerian ESDM RI merupakan Kementerian teknis yang lebih memahami permasalahan pertambangan mineral dan batubara.
3. Komisi VII DPR RI menyetujui usulan Menteri ESDM RI untuk meningkatkan stratifikasi golongan tarif pelanggan PT PLN (Persero) dalam rangka meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan keandalan tenaga listrik yang lebih optimal bagi masyarakat dengan tidak merubah besaran tarif tenaga listrik yang telah ada.

4. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk terus melakukan evaluasi tarif listrik pelanggan PLN Batam dengan mempertimbangkan nilai keekonomian yang layak.
5. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 26 Maret 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.30 WIB

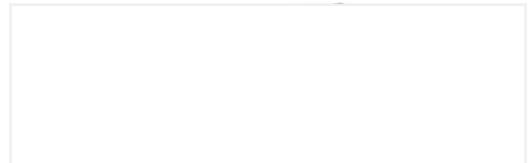
Jakarta, 19 Maret 2024

MENTERI ESDM RI



ARIFIN TASRIF

KETUA RAPAT,



H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H
A-496